

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia merupakan mekanisme penting dalam sistem demokrasi yang memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin yang akan mengelola pemerintahan daerah. Sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, kepala daerah dipilih secara demokratis, yang menjadikan Pilkada sebagai wujud nyata kedaulatan rakyat dalam menentukan pemerintahan yang mereka inginkan. Proses ini tidak hanya berkaitan dengan pergantian pemerintahan yang aman dan tertib, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional (Makamah Konstitusi RI., 2005). Pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi syarat. Kepala daerah dan Wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup, Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi, Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, Walikota dan Wakil Walikota untuk kota yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan. Hal tersebut diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang. Pilkada dalam politik memberikan ruang kepada seluruh elemen untuk berkontribusi secara aktif. Adapun tujuan dari penyelenggaraan Pilkada serentak merupakan suatu upaya untuk memperkuat sistem presidensial, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam menyalurkan hak politiknya.

Pemilihan Bupati sebagai kepala daerah sangatlah penting karena Bupati sebagai pemegang kekuasaan otonomi daerah. Masyarakat harus turut andil dalam pilkada untuk mewujudkan sifat demokratis diluar dari kewajiban sebagai warga negara yang baik. sejak diberlakukannya otonomi daerah, Pilkada menjadi lebih kompetitif dan melibatkan berbagai aktor politik, mulai dari partai politik, calon independen, hingga masyarakat. Dalam proses pemilihan calon kepala daerah, ada banyak tahapan yang harus dilalui, salah satunya adalah penetapan calon. Proses penetapan calon ini tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan elektoral, tetapi juga oleh dinamika internal partai politik, strategi koalisi, dan pertarungan kepentingan di tingkat lokal. Oleh karena itu, pemilihan kepala daerah sering kali melibatkan faktor-faktor politik yang kompleks, termasuk kekuatan aktor-aktor lokal, politik patronase, serta peran politik klan atau keluarga besar.

Kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak pada tahun 2024, yang melibatkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Polewali Mandar telah memulai tahapan Pilkada dengan menekankan pentingnya partisipasi

aktif masyarakat untuk menciptakan iklim demokrasi yang kondusif. Sebagai bagian dari persiapan teknis, KPU juga telah merekrut Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), memberikan kesempatan yang adil bagi siapa saja yang ingin bergabung menjadi bagian dari badan Adhoc. Tahapan Pilkada di Kabupaten Polewali Mandar dimulai pada Februari 2024, dengan pendaftaran calon perseorangan pada Mei 2024 dan pengusulan pasangan calon oleh partai politik pada Agustus 2024. Penetapan pasangan calon dilakukan pada akhir September 2024 (Pembacaan Polewali Mandar, 2024).

Assami merupakan pasangan calon yang memenangkan Pilkada 2024 kemarin di Kabupaten Polewali Mandar dengan perolehan suara sebanyak 111.950 suara (PolewaliTerkini.net, 2024). H. Samsul Mahmud sebagai calon bupati Polewali Mandar, dikenal sebagai seorang pengusaha di bidang konstruksi dan perdagangan. Sebelum mencalonkan menjadi bupati, H. Samsul Mahmud merupakan ketua DPD Partai Golkar selama dua periode yaitu periode 2018-2020 dan periode 2020-2025. H. Samsul Mahmud juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan di Polman yang meningkatkan popularitasnya di kalangan masyarakat. Hj. Andi Nursami. MP sebagai calon wakil bupati polewali mandar, yang akrab disapa Puang Sami, memiliki pengalaman panjang dalam pemerintahan Kabupaten Polman. Hj. Andi Nursami. MP pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan pada tahun 2019-2021 dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) pada tahun 2021-2024. Selama masa kepemimpinannya, Polman berhasil mewakili Sulawesi Barat dalam pentas budaya tingkat nasional di Istana Merdeka dan meraih juara pertama. Prestasi ini menjadi tolak ukur kepemimpinan Hj. Andi Nursami. MP dan meningkatkan simpati masyarakat Polman terhadapnya. Hj. Andi Nursami. MP merupakan bagian dari keluarga besar Masdar, yang telah lama dikenal sebagai salah satu keluarga terpandang di Polewali Mandar. Keluarga ini memiliki jejak panjang dalam dunia politik, birokrasi, dan pemberdayaan masyarakat di daerah tersebut. Keluarga Masdar dikenal memiliki hubungan yang baik dengan banyak tokoh di Sulawesi Barat, khususnya di Polman, yang membuat nama keluarga ini dihormati oleh berbagai kalangan.

Fenomena penetapan pasangan calon (Assami), yang terdiri dari H. Samsul Mahmud dan Hj. Andi Nursami, telah menarik perhatian publik dan media dengan cukup signifikan. Ada beberapa alasan mengapa pasangan ini menjadi sorotan. Pertama, mereka mewakili kombinasi pengalaman dan rekam jejak yang kuat, baik sebagai tokoh politik maupun birokrat. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memiliki latar belakang yang cukup mumpuni untuk memimpin Kabupaten Polewali Mandar. Namun, yang membuat fenomena ini semakin menarik adalah dinamika politik yang terjadi di dalam Partai Golkar, partai yang mengusung mereka. Proses penetapan calon ini tidak lepas dari berbagai isu kompleks, Salah satu isu yang cukup kontroversial adalah status Hj. Andi Nursami sebagai ASN yang masih aktif saat menerima surat rekomendasi. sebelum mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati, Hj. Andi Nursami. MP diduga masih berstatus sebagai

Aparatur Sipil Negara (ASN). Hj. Andi Nursami. MP menerima rekomendasi dokumen atau formulir resmi yang dikeluarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai bentuk persetujuan pencalonan pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah (B1-KWK) dari Partai Golkar dan Perindo pada Agustus 2024, Hal ini menimbulkan dugaan pelanggaran kode etik ASN karena menerima dukungan partai politik saat masih aktif sebagai ASN. Ini menimbulkan pertanyaan tentang netralitas ASN dalam politik, yang menjadi perhatian banyak orang.

Euforia kemenangan pasangan Assami dalam Pilkada 2024 mencerminkan harapan masyarakat akan pemerintahan yang lebih responsif dan proaktif. Masyarakat menginginkan pemimpin yang tidak hanya mampu mengelola pemerintahan dengan baik, tetapi juga memiliki visi yang jelas untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warga. Keberhasilan Assami dalam memenangkan Pilkada 2024 di Kabupaten Polewali Mandar tidak hanya ditentukan oleh popularitas dan kompetensi pasangan calon, tetapi juga oleh pengaruh kuat aktor-aktor politik lokal, koalisi partai, serta jaringan patronase yang terbentuk selama proses pencalonan. Partai politik memainkan peran yang sangat penting dalam penetapan calon, baik dalam merumuskan strategi politik maupun dalam menentukan pasangan yang dianggap paling mampu meraih kemenangan. Peranan Partai politik tidak lepas dari pemilihan kepala daerah. Partai politik menjadi kendaraan bagi para aktor politik untuk terjun pada pemilihan daerah. Di era Demokrasi seperti saat ini, sudah menjadi keharusan seorang kontestan pasangan calon kepala daerah memiliki strategi dan kemampuan untuk memikat dan meyakinkan seluruh elemen pemilih utamanya Partai pengusung. Calon kepala daerah dan partai memiliki hubungan yang saling membutuhkan satu sama lain. Calon kepala daerah membutuhkan Partai pengusung untuk maju dalam kontestasi politik begitupun partai politik sebaliknya yang membutuhkan calon untuk menjalankan visi dan misi partai politik dan tentunya untuk mendapatkan kekuasaan di daerah tersebut.

Dalam hal ini, Partai Golkar merupakan partai yang mengusung Assami sebagai pasangan calon pada pilkada 2024 kemarin, bersama dengan dukungan dari Partai Perindo dan Partai Bulan Bintang. Partai Golkar, sebagai salah satu partai politik terbesar di Indonesia, memiliki pengaruh signifikan di Kabupaten Polewali Mandar. Beberapa pemimpin di Kabupaten Polewali Mandar berasal dari Partai Golkar, yang berperan penting dalam pemerintahan daerah dan pembangunan lokal. Salah satu figur penting yang pernah menjabat sebagai bupati adalah Andi Ibrahim Masdar (AIM), yang dikenal sebagai tokoh politik dari Golkar. AIM pernah menjabat sebagai Bupati Polewali Mandar dan memiliki pengaruh yang besar dalam membangun koneksi politik di daerah tersebut. Partai Golkar selalu menjadi salah satu partai besar yang ikut andil dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Polewali Mandar. banyak pilkada sebelumnya, Golkar telah mengusung calon-calon bupati atau wakil bupati dan memperoleh hasil yang cukup signifikan. Seiring dengan perkembangan politik di Indonesia pasca-Orde Baru, Partai Golkar di

Kabupaten Polewali Mandar terus mempertahankan pengaruhnya meskipun dihadapkan pada persaingan politik yang semakin ketat dengan munculnya partai-partai baru. Pada Pemilu 2024, Partai Golkar berhasil memperoleh 7 kursi di DPRD Kabupaten Polewali Mandar, menjadikannya sebagai partai dengan perolehan suara terbanyak di daerah tersebut. Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2024, Partai Golkar meraih suara 46.022. Di 5 Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Polman. Yakni, Dapil 1 Polman, Kecamatan Polewali dan Binuang, meraih suara 8.022, Dapil 2 Polman, Kecamatan Tinambung, Balanipa, Limboro dan Alu meraih suara 7.951, Dapil 3 Polman, Kecamatan Campalagian, Luyo dan Tutar. Meraih suara 11.370, Dapil 4 Polman, Kecamatan Wonomulyo, Mapilli dan Bulu. Meraih suara 8.891 dan Dapil 5 Polman, Kecamatan Matakali, Tapango, Anreapi dan Matangnga. Meraih 9.788 (Redaksi, 2024). keberhasilan ini tidak hanya menunjukkan konsistensi dukungan masyarakat terhadap Golkar, tetapi juga memperkuat dominasinya dalam konstelasi politik lokal. Dengan mempertahankan posisi sebagai partai pemenang, Partai Golkar tetap berhak menduduki kursi Ketua DPRD Polewali Mandar, sebuah posisi strategis dalam menentukan arah kebijakan daerah. dari total 40 kursi yang tersedia di DPRD Polewali Mandar, Partai Golkar mampu mengamankan representasi yang signifikan, mencerminkan soliditas mesin partai serta efektivitas strategi politik yang diterapkan dalam kampanye. Penetapan perolehan kursi bagi partai politik peserta pemilu anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar telah dilakukan secara resmi, mengukuhkan dominasi Golkar di panggung politik daerah. Keberhasilan ini juga memberikan pijakan kuat bagi Golkar dalam membangun koalisi strategis serta mengamankan dukungan legislatif untuk berbagai agenda kebijakan ke depan.

Dalam merekrut maupun memutuskan dukungan tentu terjadi dinamika dimana sebuah partai sangat berhati-hati dan mempertimbangkan banyak hal. Fungsi Rekrutmen di dalam partai tentu dilakukan untuk mencapai sebuah kemenangan. Keputusan dalam menetapkan seseorang untuk dijadikan sebagai kandidat dalam kontestasi tentu didasarkan pada banyak pertimbangan. Semua Partai saling bertarung di arena politik dalam membentuk konstelasi politik serta memperebutkan kekuasaan dan masing-masing bertahan mempertahankan setiap kepentingan-kepentingan mereka. Konsep dinamika didalam pemilu sendiri umumnya selalu berorientasi pada kemenangan. Kemenangan yang dimaksud adalah dalam hal memperebutkan kekuasaan dalam pemerintahan dan pada akhirnya berbagai dinamika terjadi dalam pengusungan calon. Dinamika internal dalam Partai Golkar, terutama terkait dengan konsolidasi kekuasaan di tingkat lokal, sangat berpengaruh terhadap penetapan Assami sebagai pasangan calon yang maju dalam Pilkada 2024. Penetapan Assami tidak bisa dipandang sebagai keputusan yang muncul begitu saja. Proses ini merupakan hasil dari negosiasi politik yang melibatkan konsolidasi internal partai pengusung dan pertimbangan berbagai kepentingan politik baik di dalam partai politik tersebut maupun di luar partai. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana dinamika internal

partai politik berkontribusi dalam penetapan pasangan calon, serta faktor politik yang mempengaruhi penetapan pasangan calon.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menelaah lebih mendalam tentang dinamika internal partai politik khususnya partai Golkar dan faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan pasangan calon H. Samsul Mahmud dan Hj. Andi Nursami. MP (Assami) dalam Pilkada Kabupaten Polewali Mandar 2024. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkajinya lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah (skripsi) dengan judul **“Dinamika Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pilkada Kabupaten Polewali Mandar”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana dinamika internal partai Golkar dalam penetapan pasangan calon H. Samsul Mahmud dan Hj. Andi Nursami. MP (Assami) dalam pilkada Kabupaten Polewali Mandar 2024?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan pasangan calon H. Samsul Mahmud dan Hj. Andi Nursami. MP (Assami) dalam pilkada Kabupaten Polewali Mandar 2024?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dinamika internal partai Golkar dalam proses penetapan pasangan calon Assami sebagai calon bupati dan wakil bupati pilkada di Kabupaten Polewali Mandar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan pasangan calon Assami sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati pilkada di Kabupaten Polewali Mandar.

1.4. Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini. dalam hal ini membagi manfaat-manfaat tersebut menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai dinamika politik internal partai, khususnya mengenai penetapan calon bupati dan wakil bupati Pilkada di Kabupaten Polewali Mandar.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dalam kajian politik lokal dan pilkada, dengan fokus pada dinamika internal partai politik dalam konteks Pilkada di daerah kabupaten polewali mandar. Ini juga dapat menjadi bahan rujukan untuk studi-studi serupa di daerah lain.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan wawasan praktis mengenai dinamika internal dalam penetapan calon kepala daerah. Penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi partai-partai politik dalam memperbaiki mekanisme seleksi calon agar lebih transparan dan berkeadilan.
- b. Memberikan pemahaman kepada pembaca dan masyarakat tentang bagaimana dinamika internal partai politik dapat mempengaruhi penetapan calon pemimpin daerah.

1.5. Teori Relasi Kuasa

Michel Foucault (1926-1984) adalah filsuf Perancis yang memiliki perhatian besar terhadap penelusuran jejak-jejak relasi kekuasaan dalam ilmu pengetahuan. Ia menulis buku tentang sejarah kegilaan (*the History of Madness*), Arkeologi Pengetahuan (*the Archaeology of Knowledge*), *Discipline and Punish* dan karya-karya lainnya, baik dalam bentuk tulisan maupun hasil wawancara. Kata kuasa dalam bahasa Indonesia, Inggris atau Jerman kerap dimengerti juga sebagai kekuasaan. Kata bahasa Inggrisnya adalah *power* dan kata bahasa Jermanya *die Macht*. Sementara itu, dalam bahasa Perancis kata kuasa diterjemahkan dengan *pouvoir* dan kata *la puissance* lebih digunakan dalam arti kekuasaan. Kekuasaan selalu mengandaikan ada orang menjadi penguasa dan yang lain dikuasai, sedangkan pengertian kuasa oleh Foucault sangat netral. Foucault juga mengakui bahwa kata kuasa bisa mengantar orang ke pengertian dominasi dalam arti ada orang menguasai yang lain dan dikuasai. Penggunaan kuasa seperti ini sangat berat sebelah, dalam arti ada pihak lemah yang selalu ditekan dan ada pihak kuat dan berpengaruh yang selalu mendominasi yang lain. Padahal, arti kuasa menurut Foucault sangat netral dan bahwa kuasa seperti ini ada di dalam diri setiap orang. Berbicara mengenai kuasa kerap membawa orang pada pemahaman tentang kekuasaan atau kuasa yang represif. Namun, tidak hanya itu. Kuasa juga dimengerti sebagai suatu strategi dalam relasi antarmanusia yang disebutnya sebagai relasi-relasi kuasa. Relasi-relasi kuasa ini tampak dalam hubungan antarmanusia. Dalam pemahaman kuasa sebagai relasi strategis orang dapat menemukan beberapa pokok pikiran sebagai berikut.

1. *Pertama*, kuasa secara esensial muncul dari relasi-relasi antara berbagai kekuatan (*forces*). Ia ada secara mutlak dalam relasi ini dan bersifat a priori, dalam arti ia tidak bergantung pada kesadaran manusia. Jelas bahwa kuasa ini bukanlah sesuatu yang diterima sebagai milik yang dapat diperoleh dan dibagi-bagi. Ia tidak bisa juga dikurangi dan ditambah, karena kalau kuasa dilihat sebagai milik yang dapat dikurangi atau ditambah, ia tidak bisa beralih ke tangan orang lain. Kalau ia dipindahkan secara paksa pasti akan muncul kekacauan, pertikaian, bahkan peperangan. Kuasa seperti ini justru sudah dipraktikkan dalam kehidupan sebelum ia menjadi milik. Jelas bahwa kuasa seperti ini sudah ada lebih dulu sebelum ia dimengerti sebagai kekuasaan atau dominasi antarmanusia.
2. *Kedua*, kuasa ini menyebar di mana-mana (*dispersed*) dan tidak dapat dilokalisasi. Di mana ada struktur dan relasi antarmanusia, di sana ada kuasa. Ia menentukan aturan secara internal dan tidak tergantung pada sumber yang ada di luarnya. Dengan itu jelas bahwa kuasa ini tidak ditentukan oleh suatu subjek yang datang dari luar.
3. *Ketiga*, kuasa dilihat sebagai mekanisme atau strategi yang memberikan penekanan pada praktik dan fungsinya dalam bidang tertentu. Kuasa ini dilaksanakan dalam banyak posisi yang dihubungkan secara strategis satu dengan yang lain. Setiap relasi kuasa secara potensial mengandung suatu strategi perjuangan (kuasi strategi perang), namun kekuatan-kekuatan itu tidak saling menindih, tidak kehilangan kodratnya yang unik dan tidak kacau. Masing-masingnya menentukan semacam batas tetap bagi yang lain.
4. *Keempat*, kuasa dan pengetahuan berkaitan sangat erat. Tanpa praktik kuasa, pengetahuan tidak dapat didefinisikan dan tanpa bentuk, juga tidak punya pegangan dalam objektivitas. Menurut Foucault pengetahuan muncul dari relasi-relasi kuasa dan bukan dari seorang subjek yang tahu. Relasi-relasi kuasa membuahkan pengetahuan tetapi pada waktu yang sama kuasa juga dapat dilihat sebagai pengetahuan. Oleh karena itu, pengetahuan tidak mungkin ada tanpa kuasa, dan sebaliknya, tidak mungkin ada kuasa tanpa pengetahuan.
5. *Kelima*, kuasa biasanya muncul dari bawah dan secara esensial tidak represif. Kendati dua unsur ini ada dalam relasi antarmanusia, esensi kuasa bukanlah represi atau dominasi. Kuasa tidak bekerja melalui represi dan intimidasi, melainkan melalui regulasi dan normalisasi. Ia tidak bersifat subjektif dan nondialektik, melainkan positif dan konstruktif.
6. *Keenam*, di mana ada kuasa, selalu ada resistensi. Namun, resistensi ini tidak pernah ada dalam posisi eksterior dalam hubungan dengan kuasa. Di sinilah pengaruh Nietzsche tampak. Menurut Nietzsche, kuasa seperti ini berkaitan erat dengan dominasi atau represi dan oleh karena itu kuasa seperti ini selalu menuntut korban atau target. Namun, dalam relasi-relasi kuasa menurut Foucault, yang dianggap sebagai penindas dapat bertemu dengan korban. Setiap tindakan seseorang dapat langsung ditanggapi

dengan reaksi orang lain, tetapi selalu dalam nuansa kebebasan dan saling menerima. Kuasa ada dalam aksi dan dapat dipraktikkan oleh seorang terhadap aksi atau tindakan orang lain. Resistensi harus dimengerti dalam arti ini (Kebung, 2017).

Relasi kekuasaan adalah hubungan yang terbentuk dari berbagai pola relasi antar-manusia yang kemudian membawa suatu kepentingan dengan tingkat kekuasaan tertentu. Dalam pikiran Foucault, kekuasaan tidak dimaknai secara negatif melainkan produktif dan reproduktif. Menurut filsuf asal Prancis tersebut, kekuasaan tidak terpusat tetapi menyebar dan mengalir, kemudian dinormalisasikan dalam praktik kedisiplinan. normalisasi yang dimaksud disini bisa berupa disiplin. Kekuasaan juga bisa beroperasi dan dijalankan dalam masyarakat, melalui legitimasi dari pengetahuan (Maarif, 2023).

Relasi kuasa merupakan konsep yang dikembangkan oleh Michel Foucault, yang menekankan bahwa kekuasaan bukan sekadar milik individu atau institusi, melainkan terdistribusi melalui berbagai hubungan sosial. Foucault memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang produktif, yang membentuk perilaku, hubungan, dan struktur dalam masyarakat. Kekuasaan bekerja melalui berbagai mekanisme, seperti wacana, institusi, dan praktik sosial, yang kemudian membentuk dan mengatur kehidupan individu maupun kelompok (Foucault, 1980).

Dalam konteks politik lokal, relasi kuasa dapat terlihat pada bagaimana aktor politik, partai, dan kelompok masyarakat saling memengaruhi untuk mencapai tujuan tertentu. Relasi ini sering kali diwujudkan melalui politik patronase, jaringan kekerabatan, serta penggunaan sumber daya politik dan sosial. relasi kuasa memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam pemilihan kepala daerah. Menurut Aspinall (2013), politik lokal di Indonesia sering kali dipengaruhi oleh praktik patronase dan klanisme, di mana aktor politik menggunakan jaringan sosial dan ekonomi untuk memobilisasi dukungan. dalam konteks pemilihan kepala daerah, kekuasaan tidak hanya berasal dari otoritas formal, seperti partai politik, tetapi juga dari kekuatan informal, seperti pengaruh keluarga besar, hubungan sosial, dan dukungan masyarakat berbasis tradisi dan budaya (Hadiz & Robison, 2005). Relasi kuasa ini menjadi alat bagi elite politik untuk memperkuat legitimasi mereka di mata pemilih.

Dalam konteks Partai Golkar, teori ini relevan untuk memahami bagaimana aktor-aktor politik di tingkat lokal bernegosiasi dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam penetapan pasangan calon kepala daerah. Foucault juga menekankan pentingnya wacana dalam pembentukan kekuasaan. Dalam kasus ini, wacana yang digunakan oleh Partai Golkar dalam mempromosikan pasangan Assami dapat dianalisis untuk memahami bagaimana partai mengkonstruksi legitimasi pasangan calon di tengah masyarakat dan di internal partai. Di dalam partai teori ini melihat hubungan patron-klien yaitu pengurus partai sebagai patron dan kliennya adalah orang-orang yang ingin mendapatkan rekomendasi calon.

Teori relasi kuasa memberikan landasan konseptual untuk memahami dinamika politik dalam Pilkada Polewali Mandar. Kekuasaan di sini tidak hanya menjadi alat untuk memenangkan kontestasi politik, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menciptakan dan mempertahankan hubungan antara partai politik, calon, dan masyarakat. Relasi kuasa dalam penelitian ini menunjukkan bagaimana kekuasaan bersifat kompleks, melibatkan negosiasi, patronase, dan pengaruh basis massa.

1.6. Partai Politik

Partai politik merupakan institusi sentral dalam sistem demokrasi. Menurut Budiardjo, partai politik adalah kelompok terorganisasi dengan orientasi, nilai, dan tujuan yang sama, berupaya merebut kekuasaan politik secara konstitusional (Miriam Budiardjo 2008). Sartori menekankan bahwa partai politik berfungsi untuk menempatkan kandidat dalam jabatan publik melalui mekanisme pemilu. Burke memperluas pengertian ini dengan menjelaskan bahwa partai adalah sarana untuk mempromosikan kepentingan nasional berdasarkan prinsip-prinsip yang disepakati anggotanya.

Menurut Schattschneider, partai politik berfungsi sebagai lembaga yang menentukan siapa yang akan memimpin dalam pemerintahan. partai politik juga merupakan arena untuk bertarungnya berbagai kepentingan dan faksi internal yang memiliki tujuan politik tertentu. Schattschneider berargumen bahwa partai politik memiliki kontrol besar terhadap agenda politik yang diusung.

Menurut Schattschneider (1942), partai politik memiliki dua fungsi utama yang saling terkait:

1. Sebagai alat Penghubung, Partai bertindak sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah, menyalurkan aspirasi publik menjadi kebijakan yang konkret.
2. Sebagai arena Kompetisi, Partai menciptakan ruang bagi berbagai kelompok kepentingan untuk bersaing dalam memengaruhi agenda politik dan kebijakan pemerintah.

Demokrasi, menurut Schattschneider, hanya dapat berjalan efektif jika partai politik mampu mengelola kompetisi secara sehat. Kompetisi tersebut tidak hanya mendorong inovasi kebijakan, tetapi juga memastikan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat. Partai juga bertanggung jawab menciptakan struktur pemerintahan yang stabil dan menyusun prioritas kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan publik. Schattschneider berargumen bahwa demokrasi tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya partai politik yang efektif. Beberapa poin utama dari teori ini adalah:

1. Partai Politik sebagai Organisasi Penghubung

Partai berfungsi sebagai penghubung antara rakyat dan negara. Mereka membantu menyampaikan aspirasi rakyat ke dalam kebijakan pemerintah dan mengorganisasi pandangan politik di antara masyarakat. Dengan kata lain, partai memperjuangkan kepentingan publik dan menyusun program-program politik yang disampaikan kepada pemilih.

2. Kontrol terhadap Pemerintahan

Partai politik bertanggung jawab dalam menciptakan struktur pemerintahan dan kontrol atas kebijakan-kebijakan yang diambil oleh negara. Schattschneider menyatakan bahwa partai bukan hanya memainkan peran dalam pemilu, tetapi juga dalam pengaturan pemerintahan sehari-hari, seperti dalam penyusunan dan implementasi kebijakan.

3. Pentingnya Kompetisi dalam Demokrasi

Menurut Schattschneider, kompetisi antar partai politik adalah esensial untuk menjaga keberlangsungan demokrasi. Tanpa adanya kompetisi yang sehat antara partai-partai, demokrasi akan terancam. Hal ini karena kompetisi tersebut mendorong terjadinya inovasi kebijakan dan memastikan akuntabilitas pemerintahan

4. Penciptaan Isu-isu Politik

Partai politik juga berperan dalam menciptakan dan mendefinisikan isu-isu politik. Mereka mengorganisir masalah-masalah yang dianggap penting oleh masyarakat dan kemudian memperjuangkannya dalam kerangka kebijakan negara

5. Partai Politik dan Keterlibatan Massa

Schattschneider mengkritik pandangan bahwa massa atau rakyat tidak terlibat dalam proses politik. Dia berpendapat bahwa partai politik memungkinkan adanya keterlibatan rakyat yang lebih luas dalam proses politik, meskipun sistem politik itu sendiri bisa jadi tidak selalu transparan atau mudah dipahami oleh setiap individu.

Partai politik yang dikemukakan oleh E.E. Schattschneider dalam bukunya *Party Government* (1942) memberikan dasar yang kuat untuk memahami peran partai politik dalam proses politik, terutama dalam mekanisme penetapan calon dalam pemilihan umum, termasuk Pilkada. Schattschneider menekankan bahwa partai politik bukan hanya sekadar organisasi yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan, tetapi juga sebagai instrumen yang menyaring dan menentukan agenda politik. Schattschneider juga menyoroti pentingnya institusionalisasi partai untuk stabilitas politik, dengan menyatakan bahwa tanpa partai, perubahan kekuasaan cenderung menggunakan kekerasan. Partai politik berfungsi sebagai penggerak mobilisasi politik, pendidikan politik, dan agregator kepentingan masyarakat. Partai berperan dalam menentukan siapa yang akan diusulkan sebagai calon, sehingga mereka memiliki kekuatan besar dalam membentuk pemerintahan. Schattschneider menyatakan bahwa tanpa partai, demokrasi tidak dapat berfungsi secara efektif, karena partai menciptakan struktur yang diperlukan untuk mengorganisir dan menyalurkan aspirasi masyarakat ke dalam sistem politik.

Secara keseluruhan, Schattschneider menekankan bahwa keberhasilan suatu sistem demokrasi bergantung pada partai politik yang mampu berfungsi dengan baik dalam mengorganisir kompetisi politik dan menyediakan saluran komunikasi antara rakyat dan pemerintah.

Dinamika internal partai mencakup proses pengambilan keputusan, konflik kepentingan, dan konsolidasi kekuasaan di dalam partai. Menurut Sartori (2005), partai politik bertindak sebagai "organisasi kepentingan" yang harus menjaga keseimbangan antara kepentingan elite partai dan harapan konstituen. dinamika internal partai politik mengacu pada proses, mekanisme, serta hubungan yang terjadi di dalam struktur organisasi partai dalam mengambil keputusan-keputusan penting, seperti penetapan calon dalam pilkada. Penetapan calon bupati dan wakil bupati oleh partai politik adalah hasil dari berbagai interaksi yang melibatkan kepentingan internal partai, persepsi terhadap elektabilitas, serta kekuatan-kekuatan politik di luar partai itu sendiri (Liddle, 2000). Partai politik berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai kekuasaan politik, dan dalam konteks pemilihan kepala daerah (Pilkada), partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan siapa yang akan diusung sebagai calon. Dinamika internal partai politik, terutama dalam partai besar seperti Partai Golkar, mempengaruhi penetapan calon dalam Pilkada. Beberapa faktor yang memengaruhi dinamika ini antara lain:

1. Koalisi dan Negosiasi Politik

Koalisi adalah istilah yang kerap muncul dalam dunia politik yang merujuk pada persekutuan atau aliansi antara dua atau lebih kelompok untuk mencapai tujuan bersama. merujuk Encyclopedia Britannica, koalisi adalah kelompok orang yang mengoordinasikan perilaku secara terbatas guna mencapai tujuan bersama. Sebagai bentuk kerja sama, keanggotaan koalisi bersifat sukarela dan berorientasi pada tujuan yang ingin diraih bersama. meskipun mencakup beberapa orang, tiap individu dalam koalisi sering kali memilih mempertahankan identitas juga kepentingan mereka yang khas. namun keinginan mereka tetaplah sama, yakni meraih tujuan bersama yang tidak dapat diraih oleh masing-masing individu. Dengan demikian, dalam semua konteks koalisi merujuk pada bentuk kolaborasi yang bertujuan untuk mencapai hasil yang lebih besar atau lebih signifikan melalui kerja sama antarpihak yang terlibat.

Koalisi partai politik adalah koalisi yang terjadi ketika beberapa partai politik bergabung dan membentuk aliansi untuk memenangkan pemilihan umum. Tujuannya adalah menggabungkan suara dan dukungan dari berbagai partai untuk meningkatkan kekuatan politik. Contohnya koalisi partai oposisi melawan partai berkuasa. (CNN Indonesia, 2024). Andrew Heywood berpendapat koalisi adalah penggabungan sekelompok partai politik yang berkompetisi, secara bersama-sama memiliki persepsi tentang kepentingan, atau dalam menghadapi ancaman serta dalam penggalangan energi kolektif. Lebih lanjut menurut Shively, apa itu koalisi

dapat didefinisikan sebagai gabungan antara beberapa kelompok untuk mengendalikan dan menghimpun kekuasaan, sehingga kepentingan pihak-pihak yang berkaitan tersebut dapat terakomodasi.

Koalisi juga dapat diartikan sebagai bentuk persetujuan secara formal yang memiliki kontrak bersama di antara dua partai politik atau lebih, guna menjamin kekuasaan pemerintah atas dasar adanya dari mayoritas. Di negara demokrasi yang menganut multi-partai seperti di Indonesia, koalisi biasanya dilakukan oleh beberapa partai yang menjadi peserta pemilu legislatif. Sehingga, apa itu koalisi adalah gabungan antara beberapa partai peserta pemilu legislatif untuk mencapai tujuan tertentu (Merdeka.com, 2024). Koalisi adalah aliansi antara dua atau lebih kelompok, biasanya partai politik, yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, seperti memperoleh suara mayoritas dalam pemilihan umum. Dalam konteks politik, koalisi sering dibentuk untuk membentuk pemerintahan yang stabil ketika tidak ada partai yang memiliki mayoritas mutlak.

Pengertian negosiasi adalah sebuah proses diskusi. Negosiasi dilakukan untuk tujuan menyelesaikan sebuah masalah. Pengertian negosiasi menurut asal katanya adalah sebuah proses diskusi strategis. Proses diskusi tersebut dilakukan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Caranya dengan sesuatu yang bisa diterima oleh masing-masing pihak yang ikut serta dalam bernegosiasi. Pengertian negosiasi dalam kamus Oxford adalah suatu cara untuk mencapai kesepakatan. negosiasi ini dilakukan melalui sebuah diskusi formal. Di dalam negosiasi, masing-masing pihak yang ikut serta harus mencoba membujuk pihak lain. tujuannya supaya mereka dapat menyetujui sudut pandang dari pihak yang membujuk tersebut. Melalui negosiasi, semua pihak yang ikut terlibat akan mencoba untuk menghindari pertengkaran. Pihak-pihak yang ikut bernegosiasi harus setuju untuk mencapai sebuah bentuk kompromi. Secara umum, pengertian negosiasi adalah sebuah bentuk interaksi sosial. Interaksi tersebut dilakukan oleh beberapa pihak. Tujuan dari interaksi tersebut adalah mencapai sebuah kesepakatan bersama. Negosiasi politik merujuk pada proses di mana berbagai pihak dengan kepentingan berbeda berunding untuk mencapai kesepakatan. Ini melibatkan kompromi dan kolaborasi untuk mengintegrasikan pandangan dan kepentingan yang beragam (Ningrum, 2021).

Koalisi adalah aliansi antara dua atau lebih partai untuk mencapai tujuan politik bersama, sementara negosiasi adalah proses diskusi untuk mencapai kesepakatan. dalam banyak kasus, penetapan calon dalam Pilkada tidak hanya ditentukan oleh satu partai, tetapi juga melibatkan koalisi antar partai. Pada Pilkada Kabupaten Polewali Mandar 2024, Partai Golkar membangun koalisi dengan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Partai Bulan Bintang (PBB) dengan tujuan mengusung pasangan calon Assami. Proses ini melibatkan negosiasi yang intens antara ketiga partai tersebut, yang harus menyepakati siapa yang akan menjadi calon yang diusung serta bagaimana kekuasaan dan keuntungan politik akan dibagi di antara mereka. Keberhasilan koalisi ini tidak hanya bergantung pada kecocokan

visi dan misi antar partai, tetapi juga pada kemampuan mereka dalam melakukan negosiasi yang efektif untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Dengan demikian, koalisi dan negosiasi politik merupakan dua elemen yang sangat penting dalam mencapai tujuan politik dalam sistem demokrasi, terutama di negara-negara dengan sistem multi-partai. Koalisi memberikan kekuatan tambahan melalui kolaborasi, sementara negosiasi menjadi alat yang digunakan untuk menyelesaikan perbedaan dan menciptakan konsensus yang dapat diterima oleh semua pihak.

2. Faksi Internal Partai

Partai Politik (Parpol) pada dasarnya digerakan oleh semangat faksi. Faksi, atau yang dikenal juga dengan intra-partai, memberikan pengaruh terhadap identitas, bentuk struktur organisasi, dan proses pembuatan keputusan internal partai. Faksi biasanya terdiri dari anggota-anggota partai yang memiliki preferensi dan tujuan utama yang sama dengan tujuan partai, namun, memiliki bukan berarti benar-benar identik atau sama dengan anggota-anggota partai lainnya, tentu masing-masing anggota memiliki tujuan tersendiri. Sehingga, satu partai bisa terdiri dari sub-grup atau intra-partai yang mungkin memiliki nuansa kepentingan yang berbeda tetapi teridentifikasi dalam satu label yang dinamakan partai. Faksi adalah kelompok dalam suatu organisasi, partai politik, atau komunitas yang memiliki pandangan, kepentingan, atau tujuan tertentu yang berbeda dari kelompok lain dalam organisasi tersebut. Faksi sering kali terbentuk berdasarkan ideologi, strategi, atau isu spesifik yang menjadi fokus perhatian mereka. Dalam konteks politik, faksi dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan arah kebijakan organisasi. Faksi juga bisa berkonflik satu sama lain, yang dapat memengaruhi stabilitas dan kesatuan organisasi secara keseluruhan.

Faksi internal partai adalah kelompok dalam suatu partai politik yang memiliki pandangan, tujuan, atau kepentingan khusus yang berbeda dari kelompok lain di dalam partai tersebut. Faksi ini sering kali terbentuk berdasarkan ideologi, kepentingan regional, atau isu tertentu. Faksi internal dapat mempengaruhi dinamika partai, termasuk pengambilan keputusan dan strategi pemilihan. Dalam beberapa kasus, faksi-faksi ini dapat berkonflik satu sama lain, yang bisa berdampak pada kesatuan dan kekuatan partai secara keseluruhan. Setiap faksi memiliki struktur organisasi yang jelas, biasanya terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota lainnya yang berperan sesuai dengan bidang tugas tertentu. Tugas penting faksi adalah mengatur dan mengelola urusan internal partai, serta menyampaikan aspirasi masyarakat atau pemilih melalui anggota legislatif yang terpilih. Dalam sistem multi-partai seperti Indonesia, keberadaan faksi internal partai juga dapat mempengaruhi arah kebijakan partai. Jika tidak dikelola dengan baik, faksi-faksi ini bisa menimbulkan ketegangan internal, yang bisa mengarah pada konflik dalam tubuh partai, mengingat adanya perbedaan kepentingan antara kelompok-kelompok dalam partai.

Faksi internal adalah kelompok-kelompok dalam partai politik yang memiliki pandangan, kepentingan, atau tujuan politik tertentu. Dalam partai besar seperti Golkar, perbedaan kepentingan antar faksi dapat menciptakan dinamika internal yang signifikan, terutama dalam penetapan calon kepala daerah. seperti Partai Golkar, yang merupakan salah satu partai besar di Indonesia, memiliki banyak kader dan simpatisan yang tersebar di berbagai daerah. Di dalam partai ini, terdapat berbagai faksi internal dengan kepentingan politik yang berbeda-beda. Perbedaan ini seringkali menciptakan dinamika tersendiri dalam proses pengambilan keputusan dan penentuan langkah-langkah politik yang akan diambil, terutama dalam hal pemilihan calon yang akan diusung dalam pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Koordinasi antara faksi-faksi internal menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya mewakili kepentingan beberapa kelompok saja, tetapi dapat mengakomodasi kepentingan seluruh anggota partai. Hal ini juga berkaitan erat dengan pencapaian konsolidasi yang baik di dalam partai agar setiap keputusan politik dapat diterima secara bersama dan memperkuat posisi partai secara keseluruhan.

3. Konsolidasi dan Pemilihan Kandidat

Konsolidasi politik merupakan proses dari upaya perwujudan sistem politik nasional dan juga pemerintahan yang terbentuk dari berbagai kemajemukan unsur masyarakat di Indonesia berdasarkan pada tujuan untuk menciptakan pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam arti lain konsolidasi juga merupakan upaya untuk menghimpun kekuatan guna kepentingan tertentu yang perlu dicapai melalui peleburan unsur heterogenitas. (Kompasiana.com) Konsolidasi dalam konteks politik adalah proses penguatan dan penyatuan elemen-elemen politik untuk menciptakan sistem yang lebih stabil dan terintegrasi. Ini melibatkan penggabungan wilayah atau entitas politik yang terpisah menjadi satu kesatuan yang lebih besar, seperti dalam pembentukan federasi atau serikat politik. (Kumparan.com, 2023) Dalam konteks Indonesia, konsolidasi politik bertujuan untuk mengintegrasikan kemajemukan masyarakat demi membentuk pemerintahan yang representatif dan efektif. Selain itu, konsolidasi demokrasi melibatkan komitmen masyarakat terhadap aturan main demokratis, mengurangi risiko pembalikan demokratisasi, dan memperdalam praktik demokras. Proses ini penting untuk memastikan keberlanjutan demokrasi di tengah tantangan politik yang ada.

Konsolidasi politik adalah proses penguatan koordinasi dan kesatuan di dalam partai untuk mencapai tujuan Bersama termasuk pemilihan kandidat yang paling potensial. konsolidasi internal dalam partai politik merupakan proses yang sangat krusial dalam menentukan pasangan calon yang akan diusung pada pemilihan umum atau Pilkada. Konsolidasi ini tidak hanya mencakup pertemuan antar pengurus partai, tetapi juga melibatkan berbagai elemen di dalam partai, mulai dari kader, simpatisan, hingga tokoh-tokoh penting yang memiliki pengaruh

dalam menentukan arah kebijakan partai. Konsolidasi yang kuat akan memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kesepakatan bersama dan dapat memperkuat posisi partai di mata publik.

Dalam konteks Partai Golkar, proses konsolidasi internal sangat mempengaruhi pemilihan pasangan calon yang akan diusung, baik untuk Pemilu maupun Pilkada. Beberapa faktor utama yang menjadi pertimbangan dalam proses ini adalah elektabilitas calon, kemampuan calon untuk membangun jaringan, serta pengaruh dan dukungan yang dimiliki oleh calon dari berbagai kalangan dalam partai. Selain itu, pengalaman politik calon dan kemampuannya dalam berkomunikasi dengan berbagai kelompok pemilih menjadi aspek penting yang dipertimbangkan. Partai Golkar, dengan struktur yang cukup besar dan terdiversifikasi, harus memastikan bahwa calon yang dipilih dapat menggambarkan kesatuan dan kekuatan partai di tingkat nasional maupun lokal. dalam Pilkada Kabupaten Polewali Mandar 2024, Partai Golkar mengusung pasangan calon Samsul Mahmud dan H Andi Nursami. MP (Assami). Pemilihan pasangan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, termasuk elektabilitas yang tinggi, kemampuan untuk menarik dukungan dari berbagai kelompok pemilih, serta potensi pasangan tersebut dalam menjaga keseimbangan kekuatan politik di dalam partai. Keputusan ini juga melibatkan pertimbangan strategis mengenai siapa yang dapat menggerakkan basis massa di berbagai daerah dan kelompok sosial, mengingat kekuatan Golkar yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Dalam hal ini, konsolidasi internal menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pasangan calon yang dipilih tidak hanya memiliki dukungan politik yang luas, tetapi juga dapat menjalankan amanah dengan efektif setelah terpilih. selain itu, konsolidasi yang baik di dalam partai juga berfungsi untuk mengurangi potensi konflik yang bisa muncul, terutama jika terdapat faksi-faksi dalam partai yang memiliki kepentingan berbeda. Dengan membangun komunikasi yang baik antara faksi-faksi ini, Partai Golkar berusaha mencapai kesepakatan yang mengakomodasi berbagai kepentingan yang ada, tanpa mengabaikan tujuan utama partai untuk memenangkan pemilihan dan memperkuat posisinya di pemerintahan. dengan demikian, proses konsolidasi internal dan pemilihan kandidat yang baik sangat menentukan keberhasilan partai dalam meraih kemenangan di pemilihan umum. Pemilihan pasangan calon yang tepat, yang didasarkan pada pertimbangan matang dan konsolidasi yang efektif, akan memastikan partai dapat bersaing dengan kekuatan penuh di arena politik dan memenuhi harapan pemilih.

1.7. Politik Patronase dan Klan

Berdasarkan glosarium, patronase adalah dukungan atau sponsor dalam bentuk uang, jabatan, ataupun proyek dari seorang patron (elite politik atau orang berpengaruh) kepada klien (rakyat atau simpatisan) dengan tujuan untuk mendapatkan kekuasaan, kekayaan, dan status. Sementara itu, Devy Dhian Cahyati & Yonatan Hans Luter Lopo, mengatakan, patronase sengaja dilakukan

oleh elite politik untuk mendapatkan dukungan pemilih dan mendapatkan kekuasaan, terutama bila mereka berada dalam situasi yang mampu mengendalikan organisasi (partai politik) dan memilih pemegang jabatan (ACLC KPK, 2024). Patronase adalah hubungan timbal balik antara patron (elite politik) dan klien (pendukung) yang melibatkan distribusi sumber daya sebagai bentuk loyalitas.

Politik patronase di Indonesia sering kali menjadi salah satu faktor utama dalam memenangkan kontestasi politik, khususnya di tingkat lokal. seperti di banyak daerah lainnya, hubungan patronase antara politisi dan masyarakat telah menjadi jaringan sosial yang sangat efektif dalam memperoleh dukungan. Politik patronase sendiri menggambarkan sebuah sistem yang sangat bergantung pada imbal balik. Politisi memberikan bantuan yang bersifat materi, seperti bantuan sosial, infrastruktur, atau akses ke berbagai peluang ekonomi, sebagai bagian dari upaya untuk memperoleh loyalitas dan dukungan. patronase mewujud karena adanya hubungan yang tidak setara, tetapi saling membutuhkan dengan kata lain, hubungan berlandaskan pertukaran kepentingan. Kekuatan politisi lokal merujuk pada pengaruh atau kemampuan yang dimiliki oleh seorang politisi di tingkat lokal, seperti di tingkat kabupaten, kota, atau provinsi. Kekuatan ini bisa dilihat dari seberapa besar politisi tersebut mempengaruhi keputusan politik, kebijakan publik, atau pembangunan di wilayah yang mereka wakili. kekuatan politisi lokal sering kali sangat penting dalam menentukan arah kebijakan di daerah dan bisa berperan besar dalam perpolitikan nasional, tergantung pada seberapa besar mereka mempengaruhi partai politik atau aliansi yang lebih besar.

Klan adalah sekelompok orang yang terikat oleh hubungan kekerabatan atau keturunan, baik secara aktual maupun simbolis. Istilah “klan” berasal dari kata Irlandia clann, yang berarti “anak-anak” atau “keturunan”. Klan sering kali berbagi nenek moyang yang menjadi simbol persatuan dan dapat memiliki totem, biasanya berupa hewan, yang melambangkan identitas kelompok tersebut. Klan merupakan bagian penting dari struktur sosial di berbagai budaya di seluruh dunia dan berfungsi untuk menjaga tradisi serta identitas kelompok. Klan adalah penggambaran terkait bentuk kelompok sosial yang bersatu dalam perasaan dan hubungan kekerabatan, sehingga hal ini berkaitan dengan keturunan yang terbagi berdasarkan pada arti suku, makna budaya, serta arti ras yang sama (Dosen Sosiologi, 2023). ciri-ciri klan yaitu:

- Hubungan Kekerabatan: Anggota klan memiliki hubungan darah yang kuat, baik melalui garis keturunan ayah (patrilineal) maupun ibu (matrilineal).
- Struktur Sosial: Klan memiliki struktur organisasi tersendiri untuk mempererat hubungan antar anggota.
- Larangan Pernikahan: Dalam banyak budaya, pernikahan antar anggota klan sering dilarang untuk menjaga kesucian hubungan kekerabatan.

Dalam hal ini, pentapan pasangan calon, mungkin saja memiliki hubungan patron-klien yang terlihat melalui dukungan masyarakat berbasis kultural dan tradisional yang dimobilisasi dalam proses pencalonan. Keluarga besar dan klan politik memiliki kedekatan yang erat dengan berbagai lapisan masyarakat di

Kabupaten Polewali Mandar, baik itu masyarakat pedesaan maupun urban. Keterlibatan tokoh-tokoh lokal ini dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat sangat penting, karena mereka mampu memberi ruang bagi komunitas mereka untuk meraih akses ke berbagai bentuk bantuan dan sumber daya yang tersedia. Selain memiliki dukungan dari klan-klan besar dan jaringan politik yang solid, mereka juga dipandang sebagai tokoh yang mampu menjembatani berbagai kebutuhan masyarakat dengan kekuasaan yang mereka miliki. Namun, politik patronase ini sering kali mendapat kritik karena dianggap memperkuat ketergantungan masyarakat pada politisi tertentu dan menciptakan siklus ketidakberdayaan.

1.8. Pemilih dan Basis Massa

Pemilih merujuk pada individu atau warga negara yang memiliki hak untuk memberikan suara dalam pilkada atau pemilihan umum. Mereka adalah orang-orang yang memenuhi persyaratan tertentu (seperti usia dan kewarganegaraan) dan terdaftar dalam daftar pemilih untuk memilih calon atau partai politik yang mereka dukung. Sementara itu, basis massa merujuk pada kelompok atau segmen masyarakat yang menjadi pendukung tetap atau inti bagi seorang politisi, partai politik, atau organisasi tertentu. Basis massa ini bisa terdiri dari individu-individu yang secara konsisten memilih atau mendukung tokoh atau ideologi tertentu, baik dalam pemilu maupun dalam berbagai kegiatan politik lainnya.

Beberapa ciri khas dari basis massa adalah:

- a. Kesetiaan politik: Basis massa cenderung memiliki tingkat kesetiaan yang tinggi terhadap seorang politisi atau partai.
- b. Keterikatan emosional atau ideologis: Basis massa sering kali terikat karena faktor ideologi, identitas sosial, atau kesamaan aspirasi dan kepentingan.
- c. Jumlah yang cukup besar: Basis massa dapat mencakup sejumlah besar pemilih, baik dalam skala lokal maupun nasional.

Pemilih adalah aktor utama yang menentukan arah politik dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai basis massa dan preferensi pemilih menjadi kunci utama dalam menentukan strategi politik. Di Kabupaten Polewali Mandar, masyarakat memiliki keberagaman sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi perilaku politik mereka. Partai Golkar, sebagai salah satu partai politik utama di daerah ini, sangat menyadari pentingnya membangun hubungan yang erat dengan berbagai segmen pemilih. Pemilih dari kalangan urban, misalnya, lebih cenderung memilih calon yang memiliki visi pembangunan yang jelas, program-program ekonomi yang rasional, dan janji-janji yang mampu meningkatkan kesejahteraan secara langsung. Mereka juga lebih kritis terhadap isu-isu pemerintahan, seperti transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan sumber daya daerah yang efektif.

Di sisi lain, pemilih dari kawasan pedesaan atau masyarakat dengan latar belakang tradisional lebih mengutamakan hubungan personal dengan calon pemimpin mereka. Di daerah-daerah ini, keputusan memilih lebih sering dipengaruhi oleh loyalitas pribadi, rekam jejak sosial, dan faktor patronase yang kuat. Oleh karena itu, untuk memenangkan Pilkada, Partai Golkar perlu memastikan bahwa calon yang diusung dapat menjangkau dan memahami kedua kelompok pemilih ini dengan baik. Partai Golkar harus merancang kampanye yang tidak hanya menyentuh aspek pembangunan modern tetapi juga menghormati nilai-nilai tradisional dan hubungan personal yang sangat penting dalam budaya lokal. Selain itu, partai juga harus mempertimbangkan potensi pemilih yang belum memutuskan (undecided voters) yang sering kali menjadi penentu kemenangan dalam pemilu. Oleh karena itu, strategi komunikasi politik yang efektif sangat dibutuhkan, terutama untuk menarik pemilih yang lebih muda, yang cenderung memiliki preferensi terhadap perubahan dan pembaruan dalam pemerintahan. Pemilih dan basis massa menjadi pertimbangan penting dalam menentukan pasangan calon yang akan diusung. Partai Golkar dan koalisinya harus memperhitungkan segmen-segmen pemilih yang dapat menjadi sumber dukungan, serta strategi untuk menarik pemilih dari berbagai latar belakang sosial dan budaya.

1.9. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah suatu acuan peneliti untuk membandingkan peneliti dengan hasil peneliti yang pernah diteliti oleh peneliti terdahulu. Penelitian terdahulu menjelaskan tentang beberapa hasil penelitian sebelumnya namun memiliki kesamaan dengan tema dibahas oleh peneliti. Berikut merupakan penelitian-penelitian yang terkait dengan judul penulis sebagai berikut:

1. Pertama, Penelitian yang ditulis oleh Yuda Perdana, penelitian tersebut berjudul "Dinamika Politik Kepala Daerah Calon Tunggal" yang diterbitkan pada tahun 2020. Jurnal ini membahas mengenai fenomena pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal di Grobogan, Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis faktor-faktor yang mendukung munculnya calon tunggal, seperti performa petahana dan preferensi partai politik untuk berkoalisi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemilihan bupati Grobogan pada tahun 2020 menghasilkan calon tunggal karena beberapa faktor. Pertama, kinerja petahana, Sri Sumarni, yang memuaskan masyarakat membuat partai politik lebih memilih berkoalisi daripada mengusung kandidat baru. Kedua, tingginya biaya politik dan kendala institusional juga berkontribusi pada fenomena ini. Penelitian ini menekankan pentingnya edukasi pemilih untuk memastikan proses demokrasi yang lebih baik di masa depan.
2. Kedua, penelitian yang ditulis oleh Muhammad Zaky Irgiawan, penelitian tersebut berjudul "Dinamika Partai Politik Dalam Memutuskan Dukungan Pada Calon Bupati Tunggal Pilkada Kabupaten Bone 2018" yang

diterbitkan pada tahun 2023, penelitian ini membahas mengenai bagaimana partai politik menentukan dukungan terhadap calon bupati tunggal. Penelitian ini menyoroti interaksi antara institusi politik dan dinamika internal serta eksternal yang mempengaruhi keputusan partai. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi proses rekrutmen dan pertimbangan strategis dalam memilih kandidat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pragmatisme politik menjadi faktor kunci dalam keputusan partai. Penelitian ini menemukan bahwa partai politik cenderung memilih calon dengan elektabilitas tinggi untuk meningkatkan peluang kemenangan, meskipun hal ini tidak selalu berkonotasi negatif. Selain itu, dinamika internal dan eksternal partai juga mempengaruhi proses pengusungan calon, menciptakan interaksi kompleks antara kepentingan politik dan strategi pemilihan.

3. Ketiga, Penelitian yang dituliskan oleh Muh. Thareq Aziz Hasbani, Penelitian tersebut berjudul "Analisis Dinamika Politik Pada Pemilihan Walikota Kota Bandar Lampung Tahun 2020". Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih dalam memilih pasangan calon walikota. Pasangan yang memenangkan pemilihan, Eva Dwiana-Deddy Amarullah, memperoleh 53,7% suara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan melalui kerangka ASOCA, yang mencakup kemampuan, kekuatan, peluang, budaya, dan kelincahan dalam strategi kampanye. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menentukan masyarakat Kota Bandar Lampung dalam memilih pasangan tersebut dilihat dari faktor tipologi pemilih yang meliputi ikatan keluarga, ikatan suku, asal-usul pasangan calon, latar belakang kandidat calon, kepercayaan terhadap pasangan calon, harapan yang relatif sama, popularitas pasangan calon, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi ideologi pemilih, dan dilihat dari kondisi awal pemilih, media massa dan partai politik/kontestan.

Penelitian terdahulu dan penelitian yang penulis lakukan sama-sama membahas dinamika politik lokal dalam konteks Pilkada. selain itu, sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif yang melibatkan teknik pengumpulan data seperti wawancara dan dokumentasi. penelitian berfokus pada peran partai politik dalam pemilihan calon kepala daerah baik dari sisi strategi, dukungan, maupun pertimbangan internal yang melibatkan partai. namun perbedaannya, penelitian terdahulu lebih mengkaji fenomena calon tunggal dalam pilkada seperti di Grobong, Kabupaten Bone, dan Bandar Lampung yang lebih bersifat generalisasi terhadap fenomena di berbagai daerah, elektabilitas calon dan strategi kampanye dari prespektif partai politik yang lebih luas serta penelitian terdahulu tidak mengkaji hubungan patron-klien dalam internal partai politik atau menggunakan teori kuasa. sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada pilkada 2024 di Kabupaten Polewali Mandar dan dinamika internal yang terjadi di DPD partai golkar

di Kabupaten Polewali Mandar sebagai konteks yang lebih spesifik dalam penetapan pasangan calon dengan analisis politik patronase dan relasi kuasa berdasarkan teori Michel Foucault. Penelitian yang penulis lakukan menggunakan teori tersebut untuk menganalisis peran pengurus partai (patron) dalam menentukan calon kepala daerah melalui hubungan patron-klien.

Penelitian yang penulis lakukan memberikan kontribusi baru dalam kajian politik lokal dengan menyoroti dampak politik patronase dalam proses penetapan calon oleh Partai Golkar di Polewali Mandar. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih menitikberatkan pada fenomena calon tunggal atau faktor elektabilitas dan strategi kampanye, penelitian yang penulis lakukan lebih spesifik dalam menganalisis dinamika internal partai dan negosiasi politik yang terjadi di dalamnya. dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi yang penting untuk memahami bagaimana kekuatan politik lokal, hubungan patron-klien, dan strategi internal partai berperan dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia.

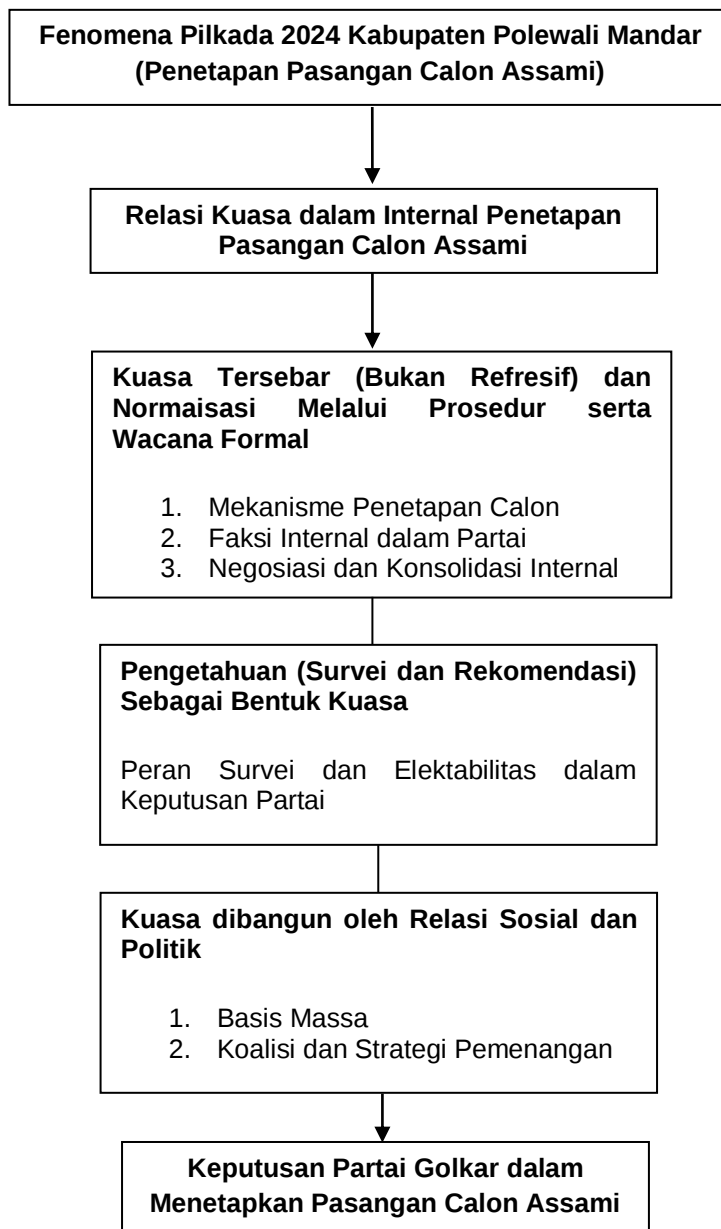
1.10. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah dasar pemikiran yang menggabungkan teori, fakta, observasi, dan kajian pustaka untuk menyusun penelitian atau karya tulis ilmiah. Ini berfungsi sebagai alur logis yang membantu penulis memahami hubungan antar variabel dalam penelitian. Kerangka berpikir memudahkan peneliti dalam merumuskan masalah dan menjelaskan hasil penelitian (Ramadhan, 2025). kerangka berpikir dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana dinamika internal partai politik, khususnya Partai Golkar, mempengaruhi penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Polewali Mandar pada Pilkada 2024.

Penelitian ini berangkat dari fenomena Pilkada Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024, khususnya proses penetapan pasangan calon Assami (H. Samsul Mahmud dan Hj. Andi Nursami) oleh Partai Golkar. Fenomena ini menunjukkan adanya dinamika relasi kuasa di internal partai yang memengaruhi proses pengambilan keputusan. Relasi kuasa dalam internal penetapan calon tidak bersifat represif, melainkan tersebar dan dinormalisasi melalui prosedur serta wacana formal yang berlaku di partai. Hal ini tercermin dari mekanisme penetapan calon yang melibatkan tahapan resmi, keberadaan faksi internal dalam partai, serta proses negosiasi dan konsolidasi antar kelompok kepentingan di dalamnya. Pengetahuan dalam bentuk survei elektabilitas dan rekomendasi juga menjadi instrumen kekuasaan. Data hasil survei digunakan sebagai legitimasi untuk memperkuat pilihan calon yang dianggap paling potensial memenangkan kontestasi sehingga menjadi pertimbangan penting dalam keputusan partai. Kemudian, kuasa dibangun melalui relasi sosial dan politik di luar struktur formal partai. Faktor basis massa yang dimiliki calon dan strategi membangun koalisi politik menjadi modal penting untuk memperluas dukungan. Koalisi tidak hanya meningkatkan peluang kemenangan, tetapi juga berfungsi menjaga soliditas barisan pendukung.

Kerangka berpikir ini memungkinkan peneliti untuk memahami secara menyeluruh proses penetapan pasangan calon assami yang terjadi di dalam partai golkar yang dimana keputusan Partai Golkar dalam menetapkan pasangan calon Assami merupakan hasil dari interaksi antara dinamika internal partai dan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi. dengan menggunakan teori Foucault penelitian ini dapat menjelaskan bagaimana relasi kuasa berkontribusi pada proses penetapan calon, serta bagaimana keputusan tersebut diambil dalam konteks persaingan politik yang lebih luas.

1.11. Skema Berpikir



BAB II

METODE PENELITIAN

2.1. Pendekatan dan Tipe penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang merupakan sebuah metodologi penelitian dengan menggunakan ketajaman serta kedalaman atas suatu fenomena objek penelitian. Tipe penelitian ini adalah deskriptif, dimana data yang dikumpulkan adalah berupa gambar, kata-kata, dan bukan angka-angka. Data yang diperoleh bisa berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan. Laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.

Melalui metode kualitatif deskriptif ini, peneliti dapat Menggambarkan bagaimana dinamika internal partai dan faktor politik memengaruhi penetapan calon, yang membutuhkan deskripsi detail. dimana penelitian ini mendalami kasus penetapan calon di Polewali Mandar, yang membutuhkan analisis mendalam, bukan generalisasi. Kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena tanpa batasan hipotesis yang kaku, memberikan kebebasan untuk memahami proses politik yang kompleks. peneliti dapat membuat penjelasan secara sistematis, aktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, serta Peneliti memilih penelitian ini karena penelitian kualitatif bersifat menyeluruh, dinamis, dan tidak menggeneralisasi. Untuk itu penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

2.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau wilayah dimana suatu penelitian dilakukan, ditetapkannya lokasi penelitian maka akan mempermudah peneliti melakukan penelitian. Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, khususnya di kantor DPD partai golkar kabupaten polewali mandar. Kabupaten Polewali Mandar dipilih karena merupakan daerah tempat berlangsungnya Pilkada 2024 untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. kantor DPD partai golkar kabupaten polewali mandar ini sebagai Lokasi penelitian dapat memberikan gambaran mengenai dinamika internal partai politik penetapan pasangan calon H. Samsul Mahmud dan Hj. A. Nursami (Assami) pada Pilkada 2024, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan yang relevan dengan masalah penelitian.

2.3. Sumber Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan data yang menurut peneliti sesuai dengan lokasi penelitian dan memberikan gambaran tentang lokasi penelitian. Adapun sumber data yang digunakan yaitu:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah informasi langsung yang diperoleh melalui interaksi dengan subjek penelitian atau pengamatan langsung di lapangan. dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan cara mencari data untuk membuktikan fakta di lapangan. Data yang diperoleh melalui lapangan atau daerah penelitian dari hasil wawancara mendalam dengan narasumber dan observasi langsung. Peneliti terjun langsung ke DPD partai golkar kabupaten polewali mandar, yang dimana partai ini Sebagai partai utama pengusung pasangan calon. kemudian, wawancara dengan pengurus partai DPD Golkar dapat memberikan wawasan tentang dinamika internal partai dan proses pengambilan keputusan. dan mengumpulkan data dalam berbagai bentuk, seperti rekaman hasil wawancara dan foto kegiatan di lapangan.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah informasi yang sudah tersedia dan digunakan untuk memperkuat analisis. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, tetapi melalui orang lain atau dengan dokumen. Dalam penelitian ini, peneliti juga melakukan telaah pustaka, dimana peneliti mengumpulkan data dari buku dan internet mengenai penetapan calon Assami pada pilkada 2024 di kabupaten polewali mandar, serta sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

2.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, wawancara secara mendalam dilakukan dengan informan yaitu orang yang dianggap paham dan mengetahui masalah yang telah diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara. dalam penelitian ini, Peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa narasumber diantaranya yaitu: Wawancara dengan pengurus partai golkar atau anggota tim internal partai yang terlibat dalam penetapan pasangan calon (Assami) Untuk memahami dinamika internal partai dan bagaimana keputusan tentang pasangan calon dibuat, mendapatkan informasi tentang proses negosiasi dan koalisi antarpolitik dan memahami pertimbangan strategis dalam mengusung pasangan calon. serta wawancara dengan anggota KPU kabupaten polewali mandar untuk memahami proses teknis dan aturan terkait pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon.

Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Tujuan
1.	Nurliah Hamzah	Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Polewali Mandar	Dipilih untuk mengetahui proses administrasi dan tahapan penjangkaran bakal calon di internal partai. serta bagaimana peran faksi di internal partai dalam memutuskan suatu keputusan dan bagaimana koalisi terbangun.
2.	Makmur Saidaman	Bendahara DPD Partai Golkar Kabupaten Polewali Mandar	Dipilih untuk memperoleh informasi tentang mekanisme penetapan calon dari perspektif pengurus inti serta keterlibatan dalam pengambilan keputusan strategis.
3.	Muhammad Haeril	Tim Sukses Pasangan Calon Assami	Dipilih untuk mengetahui strategi kemenangan, komunikasi politik, serta keterlibatan tim sukses dalam proses penetapan pasangan calon.
4.	Rudianto	Anggota KPU Kabupaten Polewali Mandar	Dipilih untuk menjelaskan prosedur resmi dan regulasi penetapan pasangan calon kepala daerah sesuai aturan penyelenggara pemilu.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik dokumentasi ini bertujuan untuk memperoleh data-data historis seperti foto, catatan harian ataupun gambar yang berhubungan dengan penelitian. dalam penelitian ini, dilakukan dengan Mengumpulkan informasi dari dokumen atau arsip resmi seperti Dokumen internal partai politik, hal ini untuk mengetahui data pendaftaran dan penetapan calon dan Kebijakan partai politik terkait pilkada. selain itu regulasi atau laporan KPU terkait tahapan Pilkada, berita dari media cetak atau online tentang penetapan pasangan calon Assami pada pilkada di Polewali Mandar.

2.5. Teknik analisis data

Data yang dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi akan dianalisis secara kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Reduksi data

Data yang telah dikumpulkan di reduksi, yaitu dengan memilih dan menyederhanakan data mentah dari wawancara dan dokumen, yang relevan dengan fokus penelitian untuk menghasilkan informasi yang lebih bermakna (Course-Net, 2023). Proses ini berlangsung terus-menerus selama pengumpulan data, dengan tujuan mengeliminasi informasi yang tidak perlu dan menyusun data agar lebih mudah dianalisis dan memfokuskan pada data yang mendukung penelitian tentang penetapan pasangan calon Assami yaitu dinamika internal partai serta faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan pasangan calon.

2. Penyajian data

Setelah reduksi, data disusun dalam format yang mudah dipahami, seperti teks naratif atau grafik, untuk memudahkan analisis dan penarikan kesimpulan. penyajian ini memberikan gambaran mengenai langkah-langkah koalisi, negosiasi, dan faktor-faktor pemilihan kandidat. dan menyampaikan analisis strategi Partai Golkar dan pengaruhnya terhadap keputusan akhir.

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Tahap akhir ini melibatkan interpretasi data yang telah disajikan untuk menarik makna dan keputusan berdasarkan hasil analisis (Populix 2022). setelah dilakukan analisis mendalam terhadap data yang telah disajikan, peneliti menarik kesimpulan mengenai dinamika internal partai golkar dalam penetapan pasangan calon assami dan faktor utama yang memengaruhi penetapan pasangan calon Assami. kesimpulan ini menjawab rumasan masalah dan tujuan penelitian.